

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini terdapat fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu peningkatan tuntutan masyarakat akan pelaksanaan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance government*). Bertambahnya tuntutan masyarakat pada penyelenggaraan *good governance* memberikan dorongan kepada pemerintah pusat ataupun daerah untuk melakukan akuntabilitas. Akuntabilitas bisa didefinisikan sebagai suatu wujud pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya misi suatu organisasi untuk memperoleh tujuan atau sasaran tertentu melalui media akuntabilitas yang dilakukan secara berkala. (Mardiasmo, 2006)

Wujud tanggungjawab pada penyelenggaraan pemerintahan dimuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pemerintah Daerah. Pemerintahan pusat ataupun daerah wajib memberikan pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan untuk menciptakan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.

Untuk menciptakan akuntabilitas, pemerintah pusat beserta pemerintah daerah perlu menyediakan serta menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan memiliki tingkat karakteristik yang memadai untuk dipergunakan oleh pemakai laporan keuangan dalam hal penentuan keputusan. Laporan keuangan bisa dikategorikan berkualitas jika laporan yang disusun oleh sebuah entitas pelaporan dengan empat kriteria yakni relevan, andal, bisa diperbandingkan serta

bisa dipahami. Karakteristik pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memadai dapat menyebabkan kekeliruan pada saat mengambil keputusan yang berakibat terhadap kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kurangnya pendapatan, lemahnya administrasi, pemborosan, inefisiensi, serta inefektivitas (Surastiani dan Handayani, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang termasuk pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 komponen yang disajikan pada laporan keuangan diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kualitas sebuah laporan keuangan dapat diukur dari opini yang disampaikan pihak BPK, yang mana opini yang diberikan berisi pernyataan terkait pemeriksaan atas laporan keuangan untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang tersaji di dalamnya (bpk.go.id). Ada 4 macam bentuk opini/pernyataan yang disampaikan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan diantaranya: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (UU No.15 Tahun 2004).

Hasil temuan yang dilakukan oleh BPK dalam lima tahun terakhir ini (2016-2020) opini pada pelaporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia sejauh ini meningkat. Pernyataan ini dibuktikan dengan kenaikan opini WTP dari persentase 70% pada tahun 2016, naik ke 76% di tahun 2017, meningkat 82% di

tahun 2018 dan kenaikan masing – masing 90% di tahun 2019 dan 2020 (bpk.go.id). Berdasarkan hal ini berarti penyajian laporan keuangan yang dilakukan pihak lembaga pemerintah daerah sudah mencapai karakteristik kualitatif dan sejalan dengan standar ketentuan yang ditetapkan.

Namun dalam pelaksanaannya, BPK masih banyak menemukan penyimpangan terkait pengelolaan keuangan, banyaknya kelemahan pada sistem pengendalian intern, dan tindakan yang tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya 11.662 permasalahan diantaranya 5.367 (46%) tentang kekurangan sistem pengendalian internal yang meliputi 1.699 (32%) permasalahan tentang lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.498 (46%) masalah tentang lemahnya sistem pengendalian dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 1.170 (22%) permasalahan tentang kelemahan struktur pengendalian intern. Selain itu BPK juga mengungkapkan adanya 6.295 (54%) permasalahan tentang ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 2.247 (36%) permasalahan tentang penyimpangan administrasi dan 4.048 (64%) permasalahan tentang ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan (<https://www.bpk.go.id/ihps>).

Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2020, BPK memberikan opini yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Pemeriksaan BPK**

Tahun Anggaran	Opini BPK
2017	WDP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Melalui hasil temuan BPK terkait pemeriksaan LKPD periode 2017 - 2020, pemerintah Kabupaten Deli Serdang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2017 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2018 sampai 2020.

Dilansir dari berita online (inilahmedan.com) pemberian opini WDP tahun 2017 disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya aset tetap belum tercatat pada neraca, aset tetap belum diakomodasi dengan data yang cukup memadai, akumulasi penyusutan yang tidak selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengelolaan kas daerah yang tidak tertib. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan masih belum sinkron dengan ketentuan, dimana dapat dikatakan laporan keuangan masih belum dapat diandalkan.

Setelah memperoleh opini WDP di tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di periode 2018 – 2020. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya dalam penyajian laporan keuangan, BPK masih banyak mendapati penyimpangan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2019 BPK mengungkapkan khususnya LKPD Deli Serdang, adanya realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu senilai Rp. 809,78 juta dan belanja kegiatan sosialisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak didukung surat pertanggungjawaban yang sah.

Dalam IHPD tahun 2020 BPK juga menjelaskan bahwa adanya pencatatan aset tetap tidak tertib, perencanaan tidak memadai, barang hasil pengadaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak ditemukan senilai Rp. 290 juta, kegiatan pencegahan covid – 19 tidak diakomodasi dengan jaminan yang lengkap senilai Rp. 341 juta ([sumut.bpk.go.id](http://sumut.bpk.go.id)).

Selanjutnya dapat ditemukannya juga masalah laporan keuangan yang tidak transparan. Hal tersebut dapat di dukung oleh tidak disajikannya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang pada situs Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor pendukung dalam penyusunan LKPD, diantaranya adalah tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan penyajian laporan keuangan. Baik buruknya laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Seseorang dapat dikategorikan paham akuntansi ketika orang tersebut mengerti jalannya mekanisme akuntansi dilaksanakan sampai pada tahap penyusunan laporan keuangan dengan memperhatikan pedoman dan prinsip pada yang berdasarkan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman serta keahlian yang dimiliki dalam menyajikan laporan keuangan akan berdampak pada kualitas laporan yang akan dihasilkan.

Penelitian Novi Anggraini (2017) mengatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin baik tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan seseorang maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sejalan dengan penelitian Lailatur Rohmah (2020) mengemukakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hal ini dibantah oleh Pavitasari (2018) dan Naomi Ikko Fidhotuzahra (2020) yang memperlihatkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam pengambilan keputusan yang tepat hampir semua organisasi memerlukan teknologi informasi dalam mengolah data menjadi informasi yang utuh. Dengan adanya teknologi yang lebih baik, maka bisa memberikan percepatan proses pengelolaan data meliputi transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan agar lebih tepat, efektif, dan efisien sehingga dapat menambah kualitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

Penelitian Ridho Baharsyah (2019) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempengaruhi kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa OPD mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Puspita et al (2020) yang mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Tampaty (2017) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin baik pemanfaatan teknologi informasi namun semakin rendah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya adalah sistem pengendalian intern pemerintah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dilakukan oleh BPK masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern yang timbul karena adanya pihak yang kurang bertanggungjawab. Semakin baik sistem pengendalian internal akan meminimalisir tingkat kecurangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik (Puspita et al, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampaty (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan artinya semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik pula kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Hasanah dan Siregar (2021) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kondisi ini disebabkan kurangnya pengawasan yang diterapkan oleh pemimpin dalam rangka penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena – fenomena dan *research gap* yang dikemukakan diatas, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini sangat penting. Jenis penelitian ini sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu namun terdapat perbedaan hasil sehingga peneliti hendak melakukan penelitian untuk menguji kembali bagaimana pengaruh beberapa faktor yaitu tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini ialah replikasi dari penelitian yang dilaksanakan oleh (Fransiscus Xaferius Tomi Kristian, 2020) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yang menjadi pembeda penelitian ini terhadap penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dikarenakan pada penelitian ini telah menggunakan variabel tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang dimana pegawai yang memiliki tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang baik dapat dikatakan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat menyelesaikan fungsi dan tanggungjawabnya.

2. Lokasi penelitian tidak sama terhadap penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di OPD Kabupaten Banyumas, sementara dalam studi ini peneliti melakukan penelitian di OPD Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penulis hendak melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul **“Faktor – Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka identifikasi permasalahan untuk penelitian ini ialah:

1. Banyaknya tuntutan akuntabilitas atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah.
2. Kurangnya pemahaman pegawai terkait SAP yang akan berpengaruh terhadap efektifitas kinerja. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya penyusunan laporan keuangan yang tidak berdasarkan SAP sehingga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan pencatatan aset.
3. Teknologi informasi yang kurang dimanfaatkan dengan baik ditandainya dengan tidak transparannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dapat diketahui dari tidak tersajikannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Situs Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
4. Dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK masih banyak menemukan kerentanan pada sistem pengendalian intern dan ketidaktaatan pada peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang merupakan rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apakah tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang?
4. Apakah tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dipaparkan diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk melihat pengaruh tingkat pemahaman standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang.
2. Untuk melihat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang.
3. Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang.
4. Untuk melihat pengaruh tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang?

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

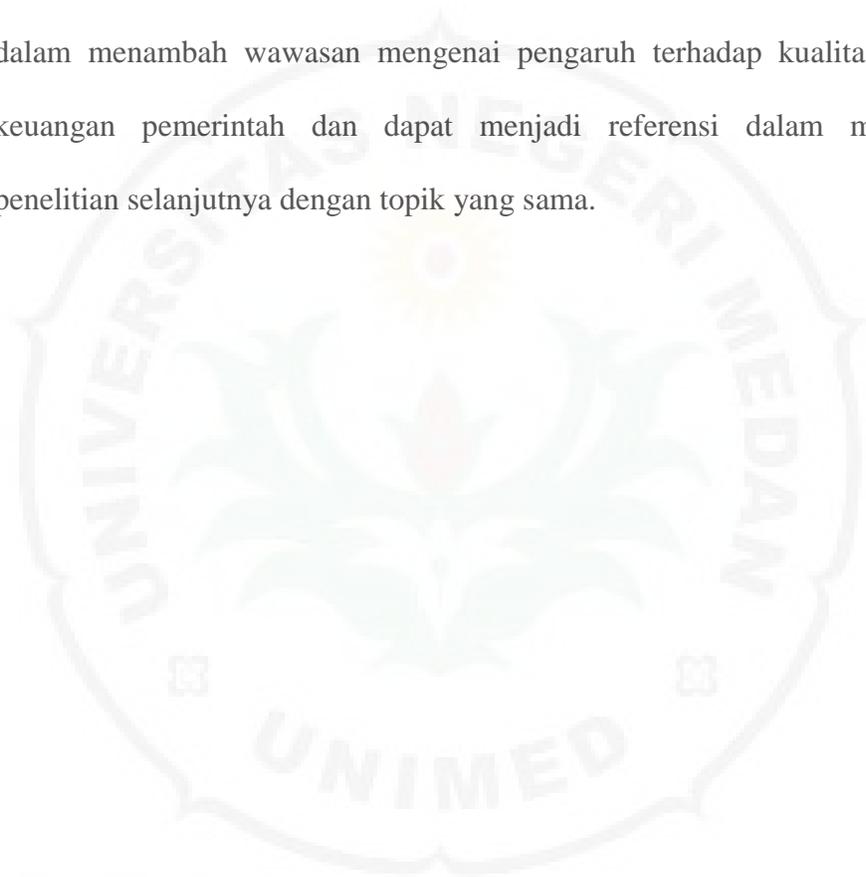
Hasil temuan ini bermanfaat kepada pemerintah daerah sebagai gambaran atau tolak ukur bagi aparat pemerintah untuk dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang memiliki pemahaman standar akuntansi keuangan serta mampu menggunakan teknologi informasi secara optimal dan melakukan pengawasan keuangan dengan baik guna tetap mempertahankan penyajian laporan keuangan yang baik.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil temuan membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bermanfaat kepada OPD yaitu pengembangan sistem pengendalian intern

akan meningkatkan fungsi pemerintahan pada tingkat kegiatan dan pengendalian kebijakan administratif.

2. Hasil temuan pada penelitian ini bermanfaat kepada peneliti selanjutnya dalam menambah wawasan mengenai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY